



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA**

**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

**DENGAN DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DEPUTI KEUANGAN DAN MANAJEMEN  
RESIKO, KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGERA REPUBLIK  
INDONESIA, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA, PT. PENJAMINAN  
INFRASTRUKTUR INDONESIA, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI.**

**SURABAYA, JAWA TIMUR**

**TANGGAL 25 September 2023 – 27 September 2023**

---

**I. PENDAHULUAN**

**Kerangka Acuan Kerja**

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan

Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi

berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Deputi keuangan dan Manajemen Resiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negera Republik Indonesia, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA, PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

## II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Deputi keuangan dan Manajemen Resiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negera Republik Indonesia, PT.PN, PT. PII, PT. PNM. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 – 27 September 2023.

## B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E.,M.M	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-18	Drs. H. FATHAN, M.A.P.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. PKB
7.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
11.	--	DWIAN PUJASSWATI	KASUBBAG. TU. SET. BAKN
12.	--	SENO WIBISUKMANA	STAF SET. BAKN
13.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
14.		MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
15.	--	HAEDAR HAKIM HUSAINY	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	MITA WAHYUNINGSIH	TENAGA AHLI BAKN
17.	--	HELMI DARMAWAN	TV PARLEMEN
18.	--	BIANCA DESTIANTI	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

## C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Deputi keuangan dan Manajemen Resiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negera Republik Indonesia, PT. PN, PT. PII, PT. PNM , dihadiri oleh:

1. Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementrian BUMN diwakili oleh Asdep bidang keuangan Bapak Bin Nahadi
2. Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia diwakili oleh Dir.Kekayaan Negara Dipisahkan, Bapak Meirijal Nur
3. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA diwakili oleh :
  - a. Bapak Mahmudi
  - b. Bapak M. Arifin Firdaus
  - c. Aris Toharisman (Dirut.PT.SGN)
  - d. Riyanto Wisnuardy (Dir.PTPN VII)
  - e. Dodik Ristiawan (Dir.PTPN IX)
  - f. Tuhu Bagun (Dir.PTPN X)
4. PT.PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA  
Diwakili oleh Bapak M. Wahid Sutopo selaku Direktur Utama PT.PII
5. PT. Permodalan Nasional Madani di wakili oleh Arief Mulyadi (Direktur Utama PT.PNM)

Pada pertemuan dengan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA, PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA, PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI, Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara sebagai berikut.

#### **Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN.**

1. Kementerian BUMN menetapkan agar tambahan PMN Tunai pada tahun 2020 – 2024 tidak melebihi dividen yang disetorkan kepada negara. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek ESG dalam program kerja dan setiap investasi. Tambahan PMN tertinggi diberikan pada tahun 2021 disebabkan kebutuhan pendanaan diantaranya dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19. Berkaitan dengan Tambahan dana PMN, Kementerian BUMN memiliki kebijakan bahwa pemberian tambahan PMN kepada BUMN diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Berdasarkan tujuan penggunaannya, PMN dapat dikategorisasikan dalam rangka Penugasan Pemerintah dan Restrukturisasi, maupun pengembangan usaha.
2. Pemberian PMN kepada PTPN pada tahun 2015 sejumlah 3,5 Triliun dengan rincian antara lain:
  - a. PTPN VII sejumlah 175 miliar
  - b. PTPN IX sejumlah 1triliun
  - c. PTPN X sejumlah 975 miliar
  - d. PTPN XI sejumlah 650 miliar
  - e. PTPN XII sejumlah 700 miliardan PT.PNM sejumlah 3,5 Triliun pada tahun 2015 da 2020
3. Kendala terkait program yang dibiayai oleh PMN pada PTPN antara lain :
  - a. Terhadap sisa dana PMN PTPN VII yang berasal dari efisiensi pengadaan turbine generator, hal ini telah mendapatkan persetujuan Para Pemegang Saham PTPN VII untuk dilakukan realokasi perubahan penggunaan dana untuk kegiatan pengembangan on farm
  - b. Terdapat ketidaksepakatan Terkait beberapa item penggantian biaya penyelesaian punchlist dan tambahan biaya PMC. Pembangunan PG Baru dengan kapasitas 10.000 TCD belum memungkinkan untuk dilakukan karena tidak ada alokasi dana PMN (tahap 2) dan kondisi keuangan Perusahaan tidak memungkinkan mendapatkan pinjaman dari pihak lain.
  - c. Proyek peningkatan kapasitas PG Gempolkrep terdapat pengakhiran Kerjasama dengan Kontraktor EPCC dikarenakan terdapat kondisi wanprestasi. Pada saat efektif Spin Off SugarCo, dana PMN yang semula untuk pengembangan kapasitas PG Gempolkrep direalokasi menjadi Pengembangan Lahan (Tahap II). Saat ini sedang dalam pencairan lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas tebu.
  - d. Kurangnya pendanaan untuk kebutuhan proyek PMN dari keseluruhan kebutuhan dana, sehingga PTPN XI melakukan pengajuan Kredit

Investasi Perbankan (BRI dan SMI), peminjaman Holding, dan Kredit Modal Kerja.

- e. Jenis dan jumlah pekerjaan yang banyak dan kompleks, sehingga ada pekerjaan yang lompat tahun. Adanya pengaduan barang impor dimana memakan waktu yang lama dalam proses pengadaannya. Saat ini sedang menunggu kelengkapan administrasi tagihan vendor untuk pembayaran.

### **Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

1. Highlight kinerja PT Perkebunan Nusantara III beberapa tahun terakhir dapat diinformasikan sebagai berikut:
  - a. Total aset dan liabilitas PTPN cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Total aset PT PN per Desember 2022 sebesar Rp149,2 triliun dan liabilitas sebesar Rp79,04 triliun.
  - b. Pendapatan dan laba bersih serta rasio *debt to equity* PTPN mengalami fluktuasi:
    - Penurunan pendapatan di tahun 2016 karena berkurangnya volume kapasitas produksi akibat cuaca (*la-nina*) yang menghambat produktivitas beberapa komoditas meskipun harga komoditas naik. Selain itu, penurunan laba bersih juga merupakan akibat adanya penurunan nilai aset (*impairment*).
    - Turunnya laba di tahun 2019 karena rendemen yang dicapai belum maksimal, biaya produksi dan keuangan tinggi, namun harga jual komoditas rendah.
    - Pada tahun 2020 s.d. 2022, kinerja PTPN membaik seiring naiknya harga CPO, dan transformasi bisnis PTPN.
2. PMN yang diberikan kepada PNM memberikan dampak positif pada kinerja neraca terlihat dari nilai total aset PNM yang meningkat didukung oleh jumlah pinjaman disalurkan yang meningkat dari Rp3,82 T pada tahun 2014, menjadi Rp38,44 T pada tahun 2022. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja pendapatan usaha dan laba bersih PNM yang meningkat signifikan dari tahun 2014 ke 2022. Struktur permodalan PNM juga mengalami perbaikan terlihat dari DER yang berhasil turun dari 6,86 di 2014 menjadi 5,30 di 2022. Namun pada tahun 2018 DER sempat melonjak ke angka 8,55 dikarenakan peningkatan liabilitas untuk digunakan sebagai sumber dana pembiayaan program Mekaar dan ULaMM serta pendirian cabang, namun DER berhasil diturunkan didukung peningkatan ekuitas seiring penambahan PMN pada tahun 2020 dan peningkatan saldo laba.
3. Highlight kinerja PT PII beberapa tahun terakhir dapat diinformasikan sebagai berikut:
  - a. Secara umum PT PII sejak tahun 2010 s.d. 2022 terus membukukan laba. Adapun atas laba tersebut, PT PII telah menyetorkan dividen untuk negara sejak tahun 2017 (atas laba bersih di tahun 2016).
  - b. Total Aset cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Total aset PT PII per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15,55 triliun.

- c. Total Liabilitas cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun masih dalam rasio *debt to equity* yang terukur dan dinilai aman. Total liabilitas PT PII per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp401,61 miliar.
- d. Total Ekuitas cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Total ekuitas PT PII per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15,15 triliun

### **PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA**

1. Modal Dasar PT PII berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.497/KMK.06/2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah sebesar Rp20 triliun. Jumlah modal disetor dalam bentuk PMN sejak berdiri sd Juni 2023 adalah sebesar Rp10,655 triliun. PMN Sebesar Rp1,57 triliun ditujukan secara khusus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional/Pandemi.
2. Tren kinerja 5 tahun menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara aspek pengembangan usaha dan pengelolaan kapasitas/risiko.
3. Kontribusi PT PII berupa Pembayaran Pajak dan Dividen Secara Akumulasi dari Tahun 2017 s.d. 2023 (Prognosa) mencapai Rp 2,1 Triliun.
4. Skala prioritas dan program kerja penjaminan ditentukan berdasarkan: Penjaminan KPBU mengacu kepada daftar proyek dalam RPJMN dan RPJMD yang dituangkan dalam RK KL dan Pemda untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri PPN/Bappenas dalam "PPP Book.
5. Penjaminan Non KPBU yang diberikan berdasarkan mekanisme penugasan dari Kementerian Keuangan dengan mengacu kepada PMK 101/2018, PMK 211/2020 dan PMK 27/2022, dimana ada Keputusan Menteri Keuangan di setiap penugasan tersebut.
6. Kendala dan hambatan apa yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program kerja terkait dengan PMN yaitu :
  - a. Kesiapan dari sektor infrastruktur (regulasi dan kelembagaan)
  - b. Kesiapan dari proyek (perencanaan, pra-studi kelayakan)
  - c. Kesiapan dari kapasitas dan komitmen dari PJPK
  - d. Koordinasi antar kelembagaan terkait skema pembiayaan yang berbeda untuk proyek yang berkaitan
  - e. Adanya perselisihan antara PJPK dengan badan usaha

### **PT.PERKEBUNAN NUSANTARA**

1. Sesuai PP RI No. 135 Tahun 2015, total PMN di PTPN III (Persero) sebanyak Rp 3,5 T. Penyertaan Modal Negara (PMN) bertujuan dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan energi dengan tujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Perkebunan Nusantara VII, IX, X, XI, dan XII meningkatkan produksi melalui revitalisasi kapasitas pabrik gula dan hilirisasi produk berbasis tebu, serta mempertahankan kepemilikan saham negara.
2. Per 31 Agustus 2023, persentase penyerapan dana PMN sebesar **61,1%** dan capaian realisasi fisik mencapai **82,02%**.
3. Kendalanya antara lain :
  - a. Penyertaan dana PMN belum mencukupi kebutuhan keseluruhan pendanaan *project* sehingga dibutuhkan pinjaman pendanaan diluar pendanaan dari PMN

- b. Keterbatasan dana mitra KSO yang berdampak pada pelaksanaan *project* tidak tepat waktu terkendala penyelesaian pembayaran atas barang/peralatan yang dipesan
  - c. Keterlambatan kedatangan peralatan impor disebabkan pembatasan pandemic Covid-19 yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan
  - d. Sinkronisasi dengan peralatan eksisting membutuhkan ketepatan waktu dan teknis serta uji coba peralatan hanya dapat dilakukan pada saat musim giling
  - e. Kesulitan dalam penyediaan barang/peralatan yang berasal dari dalam negeri
  - f. EPCC yang melibatkan kontraktor ahli dari luar negeri dalam beberapa hal menyulitkan komunikasi terkait penyelesaian project
  - g. Timbul claim dan permasalahan hukum atas project yang tidak selesai
6. Manfaatnya antara lain :
- a. Memperkuat struktur permodalan PTPN Holding PTPN III (Persero) dan peningkatan jumlah ekuitas
  - b. PTPN III (Persero) cukup memiliki sumber daya/ kemampuan finansial untuk melakukan perbaikan/revitalisasi pabrik gula di PTPN IX & PTPN XI

#### **PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI**

1. PMN Rp 1,0 Triliun diterima pada tanggal 29 Juli 2020 dan telah disalurkan seluruhnya s/d 18 Agustus 2020 kepada 342.555 nasabah PNM Mekaar di 34 Provinsi, 342 Kota/Kabupaten.
2. PMN Rp 1,5 Triliun diterima pada tanggal 4 Desember 2020 dan telah disalurkan seluruhnya di tahun 2020 kepada 534.259 nasabah PNM Mekaar di 34 Provinsi, 342 Kota/Kabupaten.

#### **TANGGAPAN/PERTANYAAN ANGGOTA BAKN**

##### **A. Bapak WAHYU SANJAYA**

###### **a. PT PNM**

Kredit total nasabah 14,6juta dan total dengan non aktif 17juta. Jumlah keluarga para sejahtera di indonesia 25,1juta artinya. PT PNM sudah mengover 80% masyarakat para sejahtera.

##### **B. Bapak Prof.Hendrawan S.**

###### **a. PT.PNM**

Jika dilihat dari jumlah nasabahnya dari bank2 tersebut. Sebenarnya masyarakat kecil sudah diguyur dana tetapi masih banyak masyarakat kecil masih banyak yang tidak siap masuk di era globalisasi ini.

###### **b. PTPN**

1. apa yang terjadi pada revitalisasi industri pada PG yang dinilai kurang maksimal?
2. Roda map penggunaan PMN harus lebih jelas bagaimana pabrik gula ini disatukan menjadi 1 yang lebih baik degan teknologi yang lebih baik.

3. Buat Rosada p yang jelas tentang revitalisasi dana PMN berapa dana yang dibutuhkan pembangunan pabrik gula yang baik.

**c. PT PII**

Kedepan mungkin ada banyak penugasan di IKN dan PT PII ini harus didorong dengan political Will agar IKN ini sukses dan Committed.

**C. IBU ANIS B.**

1. PNM ini seharusnya sudah melalui kajian jadi harusnya a tidak ada masalah a yang mengemuka terkait dengan bagaimana BUMN mengelola PMN.
2. Ketika masih ada permasalahan di BUMN terkait kinerja keuangannya, dan tidak semua BUMN bisa memberikan kontribusi bagi negara.
3. PTPN dan anak perusahaannya tidak semu basa memberikan keuntungan.
4. Proyek penugasan pemerintah kepada BUMN yang dianggap tidak memenuhi tujuan PMN
5. Bagaimana studi kelayakan dilakukan oleh PT PNM agar PMN ini bisa dimaksimalkan pemanfaatan kepada masyarakat.
6. performa PNM yang dinilai cukup baik seharusnya didorong dengan kesejahteraan masyarakat akan tetapi faktanya tidak semua masyarakat terjamah dengan perbankan.

**D. BAPAK IRWAN**

1. PTPN pembangunan pabrik gula baru di Comal Pematang, pada temuan BPK yang dibatalkan.
2. Berapa kerugian PG Djatiroto?

**E. BAPAK MISBAKHUN**

**a. PT.PNM**

1. Saya banyak berinteraksi dengan PMN dan nasabah. Berkaitan dengan PMN, ada 2 fase PMN sebelum PNM di merger atau holding dengan janji saat diholding tidak lagi mendapat PMN. PNM lahir dengan cita-cita agar mandiri secara mandiri. Masyarakat kelas bawah yang menjadi debitur akan dibantu oleh kehadiran negara melalui PNM. Dari profil ini jutaan nasabah berapa yang terentaskan kemiskinannya? Dan Bagaimana permodalannya?
2. Bagaimana nilai2 PNM ini dijaga di lapangan? Sering kali para penyalur kredit ini dikejar target.

3. Seharusnya PNM meningkatkan profil ini debitur. Dan kemudian menggeser dari nasabah mikro menjadi lebih tinggi menjadi early entrepreneurship.

b. PTPN

1. Di Jawa masih banyak lahan on farm yang bisa dipakai untuk menanam tebu. Bagaimana strategi desain dari PTPN dalam revitalisasi PG.
2. PMN bagi PTPN dinilai kurang tepat dengan policy yang kini telah berjalan untuk PTPN.

#### **D. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN**

1. Kementerian BUMN menetapkan agar tambahan PMN Tunai pada tahun 2020 – 2024 tidak melebihi dividen yang disetorkan kepada negara.
2. Modal Dasar PT PII berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.497/KMK.06/2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah sebesar Rp20 triliun. Tren kinerja 5 tahun menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara aspek pengembangan usaha dan pengelolaan kapasitas/risiko.
3. Sesuai PP RI No. 135 Tahun 2015, total PMN di PTPN III (Persero) sebanyak Rp 3,5 T. Per 31 Agustus 2023, persentase penyerapan dana PMN sebesar **61,1%** dan capaian realisasi fisik mencapai **82,02%**.
4. PMN yang diterima oleh PNM pada tahun 2020 sejumlah 2,5 Triliun
5. Dari masing-masing BUMN menunjukkan tren dan manfaat yang positif untuk negara, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

#### **E. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Deputi keuangan dan Manajemen Resiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negera Republik Indonesia, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA, PT. PII, PT. PNM. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara di Indonesia.

\*\*\*